

PAM Jaya Sosialisasi Pipanisasi ke Warga untuk Kurangi Pakai Air Tanah

JAKARTA (IM) - Perumda PAM Jaya melakukan sosialisasi pipanisasi kepada warga untuk mengurangi pemakaian air tanah dan mewujudkan tujuan cakupan layanan air bersih di DKI Jakarta.

"Pastinya tantangan saat ini sosialisasi ke warga yang masih belum ingin untuk dipasangkan pipa airnya," kata Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin di Jakarta International Velodrome, kemarin.

Pernyataan itu disampaikan usai kegiatan pelatihan manajemen (management trainee/MT) Perumda PAM Jaya bertajuk "PAMANA Future Leader" di Jakarta International Velodrome.

Dia menuturkan masih banyak warga yang menggunakan air tanah. Terlebih, ada yang menilai bahwa air itu seharusnya gratis lantaran berasal dari alam.

"Kami sosialisasi perda yang melarang mengambil air dari tanah secara berlebihan itu tidak bagus," ujarnya.

Selain sosialisasi, tantangan lain yang ditemukan di lapangan, yakni menyesuaikan kondisi tanah di Jakarta sehingga tidak mengganggu kontur lainnya. "Tanah Jakarta tuh anomali gravitasi karena di bawah utilitasnya sudah cukup padat sehingga

harus hati-hati," ujarnya.

Dengan demikian, sejumlah tantangan ini dipastikan penyelesaiannya sesuai dengan rencana yang disepakati disertai dengan sumber daya manusia (SDM) berkualitas maupun teknologi yang digunakan. Larangan penggunaan air tanah berlaku mulai 1 Agustus 2023 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sasaran, Pengendalian, Pengambilan serta Pemanfaatan Air Tanah.

Hingga kini, sebanyak 496 bangunan telah memenuhi kriteria karena sudah menggunakan air perpipaan. Rinciannya, yakni 156 bangunan di Jakarta Selatan, 134 bangunan di Jakarta Utara, 166 bangunan di Jakarta Pusat dan 40 bangunan di Jakarta Timur. Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mendorong Perumda PAM Jaya untuk memperluas jaringan pipanisasi sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi mulai April tahun ini.

"Kita mendukung dalam bentuk pemberian penyertaan modal daerah (PMD) agar mereka bisa memperluas jaringan layanan, khususnya ke Jakarta Utara dan Barat," kata Ismail. ● yan

Pihak Pelabuhan Tanjung Priok Diminta Cari Solusi Tangani Macet

JAKARTA (IM) - Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Jakarta Utara, Kempol Edy Purwanto, meminta pihak Pelabuhan Tanjung Priok bekerja sama dengan pihak terkait untuk menanganai kemacetan yang belakangan kerap terjadi di kawasan tersebut.

Edy mengatakan, kemacetan di sekitar Tanjung Priok disebabkan karena antrean kendaraan yang hendak masuk ke pelabuhan. "Jadi, penyebab utamanya adalah kendaraan masuk ke pelabuhan. Penyelesaian masalah ini dengan cara duduk bersama para stakeholder terkait, seperti Pelindo (BUMN PT Pelabuhan Indonesia)," kata Edy saat dikonfirmasi, Rabu (15/5).

Menurut Edy, pihak pelabuhan juga mestinya mengatur arus lalu lintas kontainer di dalam pelabuhan supaya tidak menumpuk dan menyebabkan kemacetan sampai ke jalan raya. "Di dalam, upaya pelabuhan itu seperti apa dalam mengatasi penumpukan kontainer agar tidak berimbas ke luar," sambungnya.

Edy mengaku, Satlantas Polres Metro Jakarta Utara sudah sering berkoordinasi dengan pihak pelabuhan

untuk mengatasi masalah kemacetan ini. Namun, terkadang ada hal-hal tak terduga sehingga macet kembali terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

Rabu pagi ini misalnya, kemacetan terjadi karena sistem gate (pintu masuk) otomatis Jakarta International Container Terminal (JICT) di Pelabuhan Tanjung Priok sempat rusak, sehingga kendaraan yang hendak masuk dilayani secara manual.

Kemacetan diperparah dengan adanya lima kapal barang yang baru bersandar di pelabuhan. Akibatnya, terjadi antrean kontainer yang mengular sampai ke luar pelabuhan. "Ada lima kapal barang yang baru bersandar sehingga banyak truk trailer mengantre untuk mengambil barang ke kapal tersebut," sambung Edy.

Edy pun mengimbau pengendara mencari jalur alternatif dan menghindari jalan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok supaya kemacetan segera surut. "Kami mengimbau kepada masyarakat yang tidak ada keperluan untuk tidak lewat jalan sekitar Pelabuhan Tanjung Priok dan mencari jalan alternatif," tambahnya. ● yan

Diduga Cemari Lingkungan, Rumah Produksi Sambal Diprotes Warga

JAKARTA (IM) - Ketegangan terjadi saat pihak Kecamatan mendatangi salah satu rumah di Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa (14/5).

Tim hukum pemilik rumah yang dijadikan bisnis pembuatan sambal berstatus dengan pihak kecamatan.

Saat dikonfirmasi, Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaeman menerangkan, saat kejadian pihaknya mendatangi lokasi rumah yang dijadikan bisnis pembuatan sambal itu untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat.

Diduga terjadi pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari produksi sambal di rumah tersebut. "Berdasarkan aduan tersebut, produksi sambal itu mengganggu warga karena menimbulkan pedas, bau, sehingga kita tindak lanjut," kata Agus melalui sambungan telepon, Rabu (15/5).

"Pada saat ke sana kebetulan ada tim hukum yang memboyong orang-orang, di situ sem-

pat terjadi ketegangan," sambungnya.

Dijelaskan Agus, warga resah dengan keberadaan produksi sambal rumah tersebut. Palsalnya menimbulkan bau hingga membuat mata pedas.

Beberapa warga, bahkan pihak RT sempat melakukan demo ke rumah yang dijadikan produksi sambal tersebut. Warga menilai aktivitas tersebut meresahkan dan telah mencemari lingkungan. "Bahkan limbah yang dihasilkan dari produksi cabai tersebut, dibuang tidak pada tempat yang seharusnya (saluran air)," jelas Agus. Sebelumnya pemilik bisnis sambal rumah itu telah ditegur, bahkan dilakukan penindakan untuk tidak beraktivitas sementara.

"Ini sudah dibahas di tingkat kota, pembahasan terkait rekomendasi produksi sambal, supaya tidak meresahkan dan justru malah menimbulkan pencemaran lingkungan," tukasnya. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



KAPAL PERANG BELANDA SANDAR DI JAKARTA

Dubes Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns (kanan) bersama Kepala Angkatan Laut Kerajaan Belanda Laksamana Madya Rene Tas (kiri) dan Komandan HMNLS Tromp KLTZ Yvonne Van Beusekom (tengah) barfoto bersama di Kapal Perang HMNLS Tromp yang sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (15/5). Kapal perang milik AL Kerajaan Belanda tersebut menjalankan misi kampanye pertahanan dan diplomatik bernama Pacific Archer bertujuan untuk menyediakan keamanan laut di seluruh dunia dan akan berlayar kembali pada Sabtu (18/5).

Ada Ormas dan Oknum Aparat di Balik Parkir Liar di Jakarta

Wakil Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menyebut, jumlah uang yang dihasilkan dari parkir liar di Jakarta, bisa menyentuh Rp 1,3 miliar per hari. Jika dikalkulasikan, jumlah tersebut mencapai Rp 38,4 miliar per bulan dan sekitar Rp 460 miliar per tahun. Angka itu didapat dari rata-rata nominal pembayaran parkir liar, yakni Rp 10.000 dan dihitung berdasarkan waktu parkir efektif selama delapan jam per hari. Jumlah tersebut juga dikalkulasikan dengan 16.000 Satuan Ruang Parkir (SRP) yang ada di Jakarta. "Padahal, jumlah SRP di Jakarta itu lebih 16.000. Jadi, pendapatannya pasti bisa bertambah lagi dari itu," ujar Tigor.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menyebut, jumlah uang yang dihasilkan dari parkir liar di Jakarta sangat fantastis. Situasi ini membuat sektor tersebut diduga kuat dilindungi dan dijaga dengan baik oleh organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat penegak hukum, sehingga sulit untuk ditinggalkan. "Pemain di sektor parkir ini melibatkan banyak pihak,

mulai dari oknum ormas dan oknum aparat juga," ujar Tigor, Rabu (15/5).

"Kondisi inilah yang membuat masalah perparkiran, terutama parkir liar, terus ada di Jakarta dan juga kota besar lainnya," lanjut dia.

Perihal seberapa besar uang dari sektor parkir liar di Jakarta, Tigor menyebut, angkanya bisa menyentuh Rp 1,3 miliar per hari. Jika dikalkulasikan, jumlah tersebut mencapai Rp 38,4 miliar

per bulan dan sekitar Rp 460 miliar per tahun. Angka itu didapat dari rata-rata nominal pembayaran parkir liar, yakni Rp 10.000 dan dihitung berdasarkan waktu parkir efektif selama delapan jam per hari. Jumlah tersebut juga dikalkulasikan dengan 16.000 Satuan Ruang Parkir (SRP) yang ada di Jakarta. "Padahal, jumlah SRP di Jakarta itu lebih 16.000. Jadi, pendapatannya pasti bisa bertambah lagi dari itu," ujar Tigor.

Oleh karenanya, Tigor mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi sektor perparkiran di Jakarta. Menurut dia, ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono beserta jajarannya diminta untuk menempatkan sektor parkir sebagai instrumen pendapatan daerah yang potensial, sekaligus alat untuk

mengendalikan kemacetan. "Jika bisa membereskan masalah parkir, maka akan mendapatkan dua fungsi itu," ujar Tigor.

Pengakuan Jukir Mini-market

Pernyataan Tigor soal uang dari parkir liar diduga mengalir ke oknum ormas serta oknum aparat dibenarkan salah seorang juru parkir minimarket di daerah Pasar Minggu. Ia meminta dipanggil Boneng. Saat berbincang santai dengannya, Selasa (14/5), Boneng mengaku, setiap hari menyeret uang hasil parkir ke ormas berlatar belakang kesukuan serta RT setempat.

"Enggak ke RT juga (setornya), maksudnya kita kumpulkan. Kan ada dari ormas juga. Nah, ya sudah, kita bagi mereka-mereka saja," tutur Boneng.

Sayang, Boneng enggan membeberkan lebih lanjut perihal mekanisme dan nilai setoran ke RT setempat dan oknum ormas. Boneng sendiri tidak setuju dengan penertiban juru parkir liar.

Ia berpandangan, profesinya ini terbelang pekerjaan halal sehingga tidak perlu dibinasakan.

Selama 13 tahun menjadi juru parkir di Alfamidi Salihara, Boneng mengaku, sering mendapati barang-barang berharga konsumen ditinggal begitu saja di dashboard motor. Sebagai juru parkir, ia merasa bertanggung jawab akan hal itu. Ia menyebut, pasti menjaga barang itu hingga konsumen datang. "Saya kalau mau punya handphone bagus, duit banyak, bisa. Uang saja pada geletak. Tapi itu semua saya pulangin ke pemilik," ujar Boneng.

Atas keyakinan bahwa pekerjaannya bermanfaat bagi orang lain, Boneng dengan tegas tidak peduli dengan rencana penertiban juru parkir oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Setelah nantinya ditertibkan ya (saya) enggak akan (menganggur), besoknya pasti parkir lagi. Memang kenapa? Ya bodo amat," ucap Boneng. "Kecuali saya nyolong, mencuri, tipu orang, boleh deh (ditertibkan)," lanjut dia. ● yan

Dishub DKI Sediakan Pelatihan Kerja bagi Juru Parkir Liar

JAKARTA (IM) - Selama satu bulan ke depan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melakukan penindakan terhadap juru parkir (jukir) liar di seluruh area Jakarta. Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo,

menyatakan bahwa pihaknya akan mendata jukir yang terangkap, kemudian meminta mereka untuk membuat surat pernyataan agar tidak memungut tarif parkir liar. Selain itu, Dishub akan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan pelatihan dan persiapan kerja terampil kepada para jukir tersebut. Para mantan jukir ini akan diarahkan dan disalurkan ke badan usaha yang membutuhkan tenaga kerja mereka.

"Mereka disiapkan untuk diberikan pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja, kemudian menjadi tenaga kerja terampil yang siap disalurkan ke badan usaha yang siap menerima mereka," ujar Syafrin di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (15/5).

Syafrin berharap para jukir ini nantinya tidak lagi melakukan tindakan pemerasan tarif parkir dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Penindakan ini dilakukan secara bersama-sama oleh tim gabungan yang telah dibentuk oleh Dishub. Tim ini terdiri dari Satpol PP, unsur Dishub berbagai wilayah, kepolisian, TNI, kewilayahan, dan unsur wali kota.

Tim ini akan berkeliling dan melakukan penindakan terhadap jukir liar di berbagai wilayah Jakarta selama satu bulan. Tim gabungan ini akan menasar lokasi parkir di daerah-daerah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

"Polanya adalah kami akan mendatangi tempat-tempat potensi parkir liar dan juru parkir liarnya ini kemudian

didata, dibina, dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan penanganan ini (parkir liar)," jelas Syafrin.

Syafrin juga memaparkan tim ini akan mobile atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, Dishub DKI akan menindaklanjuti tempat-tempat berdasarkan laporan masyarakat yang telah masuk.

"Kami bagi dalam enam tim yang ada di lima wilayah. Kemudian ada tim tingkat provinsi. Jadi seluruhnya akan mobile pelaksanaannya selama satu bulan dengan pola yang sudah ditentukan," tambahnya.

Syafrin juga mengimbau masyarakat agar tidak parkir sembarangan untuk menghindari pemerasan oleh oknum-oknum tertentu. Ia berharap penindakan ini dapat meminimalisasi jukir liar dan menjadi pengingat bagi masyarakat agar taat pada imbauan parkir yang tersedia. ● yan

Disdik DKI Janji Tindak Tegas Sekolah yang Gelar Perpisahan di Luar Kota

JAKARTA (IM) - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan, pihaknya bakal menindak tegas satuan pendidikan yang nekat melakukan kegiatan perpisahan siswa di luar kota. Dia menegaskan, Disdik DKI telah menerbitkan larangan mengenai kegiatan perpisahan siswa di luar kota. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Disdik DKI Nomor e-0017/SE/2024 yang berlaku sejak 30 April 2024. "Hanya (boleh) di sekolah masing-masing menggunakan fasilitas yang ada. Kalau ada sekolah yang melakukan di luar itu, berarti dia perlu pembinaan saya," ujar Purwosusilo dikutip dalam keterangannya, Rabu (15/5).

Kendati telah menerbitkan larangan, diakui Purwosusilo bahwa masih ada satuan pendidikan yang bersikukuh menggelar perpisahan siswa di luar kota. Ke depan, jika hal serupa masih terjadi, Purwosusilo memastikan bakal memanggil kepala sekolah untuk memberikan arahan. "Kami arahkan untuk mengadukan (perpisahan) di sekolah saja menggunakan fasilitas sekolah yang ada," ucapnya.

Berkaca dari kasus kecelakaan bus siswa SMK Lingga Kencana Depok di Subang, Jawa Barat, perpisahan di luar area sekolah bukan hanya dianggap memberatkan orangtua peserta didik, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan siswa.

"Acara di luar itu, satu, memberatkan biaya, kedua berisiko. Insha Allah di Jakarta sudah memahami, karena kami sudah sosialisasi," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, kecelakaan bus yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, Sabtu (11/5) pukul 18.45, mengakibatkan 11 korban tewas.

Bus berpelat AD 7524 OG itu diduga mengalami rem blong. Saat memasuki salah satu jalan menurun di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, bus tiba-tiba oleng ke kanan hingga menyebarkan ke jalur berlawanan dan menabrak mobil Feroza bernomor polisi D 1455 VCD.

Setelah menabrak mobil Feroza, bus terguling. Posisi ban kiri berada di atas, lalu bus tergelincir hingga menghantam tiga sepeda motor yang terparkir di bahu jalan. Lalu, bus terhenti usai menghantam tiang listrik di bahu jalan. Penumpang bus berserakan di jalan. Akibat dari kecelakaan ini 11 orang tewas, terdiri dari sembilan siswa, satu guru, dan satu warga lokal. Saat ini, korban tewas sudah dimakamkan seluruhnya.

Berdasarkan hasil olah TKP sementara, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas), Polri Irjen Pol Aan Subhanan tidak menemukan jejak rem di lokasi kecelakaan maut pariwisata tersebut. "Jadi, kalau kami lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bus tersebut. Yang ada itu bekas ban, satu bagian, diduga itu ban kanan, ada beberapa meter di situ. Kemudian sampai akhir titik kejadian di depan sana menabrak tiang listrik," ujar Aan.

Namun dari temuan hasil olah TKP itu perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah penyebab peristiwa itu akibat rem blong atau ada faktor lainnya. ● yan



RAZIA JURU PARKIR LIAR DI JAKARTA

Petugas Dishub melakukan razia juru parkir liar di Jakarta, Rabu (15/5). Dishub selama satu bulan ini akan melakukan pendekatan humanis persuasif kepada juru parkir liar di mini market seperti pendataan, pembinaan, dan edukasi yang hasilnya diserahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk disiapkan pelatihan kerja.